



Loloskan Reklamasi, Bukti Pinggirkan Masyarakat Bali

Mangupura (Bali Post) -

Potensi bahari Teluk Benoa selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, termasuk masyarakat Kelan. Tidak hanya untuk aktivitas perekonomian tetapi juga kegiatan sosio religius. Artinya, jika reklamasi terjadi, aktivitas termasuk sosial budaya masyarakat juga terancam.

Reklamasi juga menutup kesempatan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi bahari berbasis masyarakat di kawasan setempat. Penegasan itu disampaikan Bendesa Adat Kelan I Made Sugita, Minggu (17/5) kemarin.

Sugita menyebutkan, tidak ada jaminan reklamasi Teluk Benoa bakal memberikan kesempatan lebih baik bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal. "Kalau berbicara tenaga kerja, pasti kita belum siap dengan SDM. Berarti orang luar akan banyak masuk dan menyebabkan daya dukung Bali makin merosot," ujarnya.

Hal. 23

Tidak Merusak

Tidak Merusak

Dari Hal. 1

Menurutnya, walaupun Teluk Benoa direncanakan untuk dikembangkan, konsep yang tepat bukan melalui reklamasi. Semestinya Teluk Benoa tetap dilestarikan. Pemanfaatan kawasan haruslah mengedepankan konsep Tri Hita Karana khususnya menyangkut kelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat.

"Harusnya kegiatan yang tidak merusak alam. Kalau masyarakat lokal diberi kesempatan mengelola untuk perikanan atau pun pengembangan destinasi wisata baru sebenarnya bisa. Misalnya dengan pasar terapung. Jadi wisatawan berbelanja dengan menggunakan jukung. Tak hanya sektor perikanan dan pariwisata, UKM kita pun bisa jalan. Itu secara langsung masyarakat Badung khususnya dan Bali mampu bekerja sekaligus mengelola potensi yang ada. Itu baru namanya berdiri di kaki sendiri," kata anggota DPRD Badung ini.

Sayangnya, kata Sugita, pemerintah tidak melihat potensi tersebut. Pemerintah

justeru terkesan membuka peluang kepada investor luar ketimbang untuk masyarakat lokal. "Kesempatan untuk masyarakat lokal tidak diberikan dengan alasan aturan. Coba dibuatkan aturan untuk itu. Kok justru dibuatkan jalan untuk investor luar," tegasnya.

Pengamat pariwisata Dr. Ni Made Eka Mahadewi, M.Par., CHE. mengatakan, Bali sudah jelas mengembangkan pariwisata budaya dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal. Karenanya Bali membutuhkan atraksi baru yang dikemas dari sumber daya yang sudah ada di Bali, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Sehingga tenaga lokal bisa terserap dan bisa dikembangkan ke kabupaten yang ada di Bali serta tidak cuma terfokus di wilayah Bali Selatan, khususnya Badung Selatan. "Sesungguhnya potensi itulah yang menjadi sumber daya pariwisata Bali. Bali sudah melekat sebagai wisata budaya, alam dan spiritual," tegasnya. (ded/rah)

Edisi : Senin, 18 Mei 2015

Hal : Idm 23



Sepakati Sewa Rp 700 Ribu Per Tahun

Belasan Pedagang

Tempati

Pasar Seni Geopark

Bangli (Bali Post) -

Belasan pedagang yang semula berjualan di kios Penelokan akhirnya mulai menempati Pasar Seni Geopark. Hal ini menyusul adanya kesepakatan antara para pedagang dengan Pemerintah Kabupaten Bangli terkait nilai sewa kios. Sewa disepakati Rp 700 ribu per tahun. Sementara itu, sejumlah kios yang semula menutupi Pasar Geopark kini nampak sudah diratakan. Dan selanjutnya dijadikan areal parkir kendaraan.

Pantauan Minggu (17/5) kemarin, sebuah alat berat terlihat meratakan bangunan kios yang ada di depan pasar. Bekas-bekas bangunan yang berserakan diangkut menggunakan sebuah truk, dan kemudian dibuang di sebelah selatan pasar. Beberapa kios yang ada di lantai satu pasar terlihat sudah mulai buka, meski masih sepi pembeli.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis-perindag) Bangli, Nengah Sudibya, saat ditemui di pasar setempat mengatakan, pemindahan pedagang ke dalam pasar seni sudah dilakukan

sejak Rabu (13/5) lalu. Para pedagang yang semula ngotot tidak mau pindah, akhirnya membongkar sendiri kios mereka. Selanjutnya, sejak Sabtu (16/5) lalu, pihaknya menurunkan satu unit alat berat untuk membantu meratakan bekas bangunan kios milik pedagang tersebut.

Pemindahan pedagang tersebut kata Sudibya, akhirnya bisa dilakukan menyusul adanya kesepakatan antara pemilik kios dengan Pemkab Bangli terkait harga sewa. "Sekitar sembilan hari lalu, Bupati sempat turun

langsung menemui pedagang. Setelah diberikan arahan, para pedagang itu akhirnya mau masuk pasar. Nilai sewa kita sepakati Rp 700 ribu per tahun," terangnya.

Sudibya mengakui nilai sewa yang disepakati tersebut sebetulnya masih sangat kecil dari rancangan pemerintah sebelumnya. Namun, pemerintah terpaksa mengambil jalan tengah ini demi memuluskan rencana penataan Penelokan yang selama ini semrawut. Kecilnya nilai sewa terpaksa disepakati. Alasannya, para pedagang masih belum merasakan ke-

Edisi : Senin 18 Mei 2015

Hal : 7



beradaan pasar tersebut.

Pejabat asal Penglipuran ini menambahkan nantinya setelah satu tahun pasar ini berjalan nilai sewa yang diterapkan ke pedagang tersebut tentunya kembali dievaluasi. "Nanti nilai sewanya akan dilakukan evaluasi lagi. Karena kebijakan Pemkab Bangli memberikan nilai sewa sebesar itu juga pastinya dievaluasi inspektorat dan instansi lainnya," paparnya.

Karena hingga Minggu kemarin areal depan pasar masih dalam proses perataan, belum semua pedagang bisa masuk ke dalam kios. Pihaknya masih mengizinkan sejumlah pedagang berjualan di sepanjang trotoar penelakan. Mereka akan dimasukkan ke pasar setelah semua proses perataan bekas bangunan selesai dikerjakan. "Untuk lahan yang diratakan ini akan

kami jadikan tempat parkir. Penataannya kalau tidak bisa dilakukan dari APBD induk akan dianggarkan pada perubahan tahun ini," imbuhnya.

Seperti diberitakan selama ini pascarampung 2014 lalu, pengisian pasar seni geopark sempat terkatung-katung, akibat sulitnya mencapai kesepakatan nilai sewa antara Pemkab Bangli dengan belasan pedagang/pemilik kios yang ada di depan pasar tersebut. Para pedagang ngotot meminta nilai sewa Rp 300 ribu per tahun. Sedangkan Pemkab Bangli sesuai perhitungan menyodorkan nilai sewa Rp 2,7 juta per unit per tahun. Belasan pemilik kios itu menolak keinginan pemkab. Alasannya pedagang merasa tanah yang ditempatinya itu adalah lahan pribadi mereka. (kmb40)

Edisi : Senin, 18 Mei 2015

Hal : 7



Tabanan Rancang Sistem "Online" Aturan PPDB Belum Jelas

Tabanan (Bali Post) -

Tahun ajaran baru akan segera dimulai. Namun, hingga kini aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum jelas. Pihak Disdikpora Tabanan mengaku akan menerapkan sistem *online* sambil menunggu ketentuan PPDB dari Pemprov Bali.

Kadisdikpora Kabupaten Tabanan I Putu Santika ketika dikonfirmasi mengaku hingga saat ini memang belum ada aturan pasti mengenai sistem PPDB. Pihaknya memang belum memiliki gambaran jelas mengenai sistem PPDB, apakah nanti menggunakan nilai UN atau standar lainnya seperti memakai tes potensi akademik untuk sekolah unggulan. "Kita tunggu saja setelah rapat di provinsi, sistem PPDB yang akan dipakai," ujarnya.

Meski demikian kata Santika, terkait PPDB tahun ini, pihaknya menyiapkan sistem *online* untuk pendaftaran siswa dengan sistem rayon. Upaya ini dilakukan mengingat setiap tahun PPDB kerap diwarnai keluhan dari masyarakat. "Ini merupakan momentum untuk perbaikan sistem penerimaan siswa baru yang selama ini kerap diwarnai keluhan dari masyarakat," ujarnya.

Untuk PPDB *online* ini, eksekutif bersama para satuan pendidikan lainnya telah duduk bersama dengan kalangan legislatif untuk membuat aturan. Dikatakan Santika, Tabanan akan membentuk satu sekolah

unggulan di tingkat SD, SMP dan SMA. Kuota kursi di sekolah unggulan inilah yang nantinya akan diperebutkan seluruh siswa berprestasi di Kabupaten Tabanan. Penerimaan di sekolah unggulan ini sengaja dibuka lebih awal. Target pelaksanaannya adalah bulan Juni ini. Jika tidak bisa *online* akan dibuat manual dengan sistem rayonisasi. Kalau dalam proses persaingan tersebut siswa bersangkutan tidak berhasil mendapatkan jatah kursi di sekolah unggulan, maka mereka diharapkan kembali melanjutkan jenjang pendidikannya di kecamatannya masing-masing.

"Sebenarnya kualitas sekolah di mana saja sama. Hanya terkadang siswa maupun orang tua sendiri yang bersikeras ingin melanjutkan pendidikan di kota. Ini yang akan kita carikan solusi, agar tidak ada nanti yang namanya *over load* siswa," ujarnya. Dalam kasus ini, yang terpenting adalah kesadaran pada orang tua dan siswa itu sendiri. Pasalnya, baik itu SDM maupun sarana prasarana serta kualitas sekolah di masing-masing kecamatan sama. (kmb24)

Edisi : Senin, 18 Mei 2015

Hal : 12



Tolak Reklamasi

STT Banjar Ambengan Segera Bersurat ke Jokowi

Denpasar (Bali Post) -

Kendati telah bergulir selama dua tahun lebih, penolakan reklamasi Teluk Benoa nyatanya belum memasuki masa jenuh. Kali ini, Sekaa Teruna Teruni (STT) Tunas Ambara, Banjar Ambengan, Desa Pakraman Pedungan, Denpasar menyatakan sikap menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Selain membuat pernyataan sikap dan bersurat kepada Presiden Jokowi, STT Tunas Ambara juga mengundang masyarakat serta STT se-Pedungan untuk menyaksikan film dokumenter "Kala Benoa" di balai banjar setempat, Minggu (17/5) malam kemarin.

Ketua STT Tunas Ambara, Kadek Agus Suantara, mengatakan pemutaran film

dokumenter bertujuan untuk memberi wawasan masyarakat sekitar dalam memahami apa dan bagaimana dampak reklamasi. Menurutnya, rencana reklamasi Teluk Benoa hanya akan menambah kemacetan di Banjar Ambengan. Saat ini saja banjarnya yang menjadi satu-satunya akses menuju Tol Bali Mandara sudah sangat padat oleh kendaraan.

Keinginan STT Tunas Ambara untuk bersurat kepada Presiden Jokowi didukung penuh Kepala Lingkungan Banjar Ambengan, I Made Mariarta. Banjar Ambengan bahkan Desa Pedungan juga dikatakannya menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Hal. 23

Sepakat Menolak

Sepakat Menolak

Dari Hal. 1

"Saya mendukung sikap anak-anak melayangkan surat itu. 100 persen saya mendukung. Di tingkat desa semua menolak. Waktu ini dengan rekan kaling yang lain sudah sepakat menolak reklamasi," ujarnya.

Mariarta beralasan, Banjar Ambengan yang merupakan kawasan pesisir akan menikmati dampak negatif dari pengurukan teluk. Utamanya akan menjadi yang paling pertama terkena banjir.

Agus Suantara juga menambahkan, akan muncul dampak sosial budaya akibat masuknya ratusan ribu tenaga kerja seperti yang dijanjikan investor. "Katanya ada lowongan pekerjaan yang banyak, sekitar 250 ribu pekerja. Kami takutnya daerah pesisir kayak di banjar kami jadi makin padat. Contohnya dibangun jalan tol saja, kemacetan sudah

di depan mata. Belum lagi dampak di kemudian hari seperti abrasi," ujar Agus.

Atas kekhawatiran dampak tersebut, ia akan melayangkan surat berisi pernyataan sikap menolak reklamasi kepada Presiden Joko Widodo. Isi pernyataan sikap antara lain menuntut Presiden mencabut Perpres No.51 Tahun 2014, menghentikan segala peraturan hukum maupun perizinan yang memuluskan reklamasi Teluk Benoa, serta meminta Presiden untuk menerapkan kebijakan konservasi dalam penataan kawasan Teluk Benoa daripada mereklamasi dengan dalih revitalisasi.

"Saya harap pemerintah mendengar apa aspirasi kita di lingkup menengah ke bawah khususnya di masyarakat pesisir. Kita di Banjar Ambengan ini *penepi siring*, takutnya kayak Sidakarya, kena banjir, kita tenggelam di sini," tandas Agus. (kmb32)

Edisi : Senin, 18 Mei 2015

Hal : 1 dan 23